

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

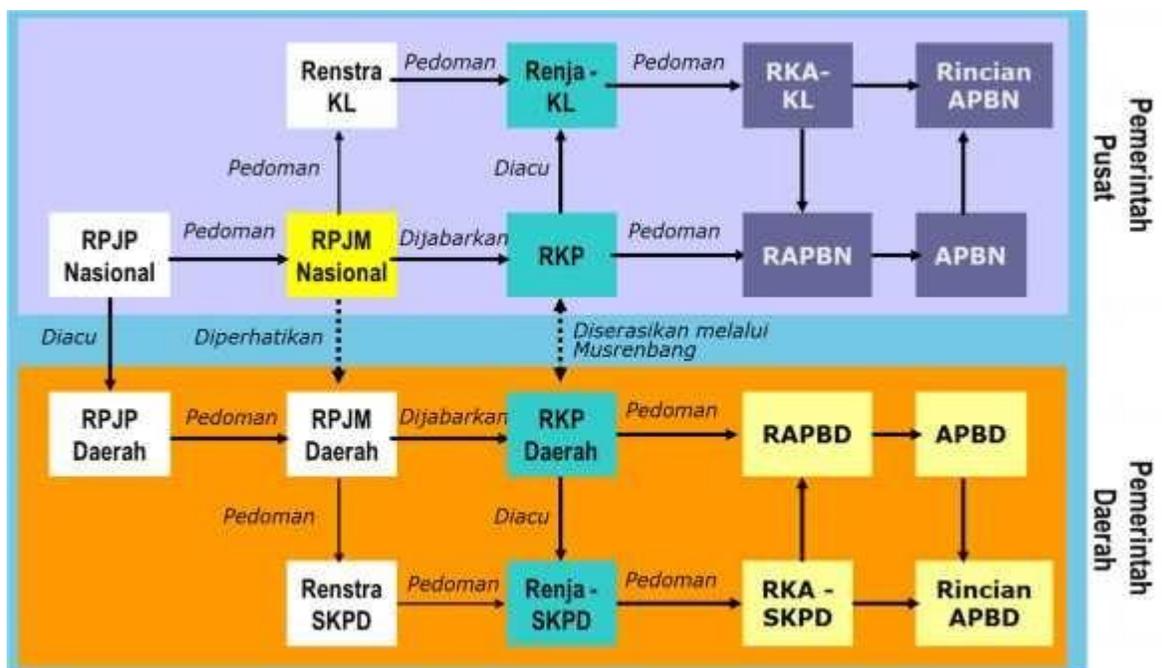
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2016-2021 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu, dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buayan disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Buayan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Buayan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara operasional Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
2. Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

3. Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011- 2031;
4. Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Buayan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2016-2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016 - 2021 yaitu sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buayan yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Buayan adalah :

1. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil Pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Merumuskan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buayan beserta target pencapaian selama kurun waktu 5 tahun.
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 tahun.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penyusunan Rencana Strategis, landasan hukum yang diacu, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAYAN

Bab ini menguraikan Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Buayan, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Buayan, serta kinerja pelayanan Kecamatan Buayan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini dituangkan identifikasi permasalahan berdasarkan berdasarkan tupoksi, identifikasi isu-isu strategis (Lingkungan eksternal), telaah visi dan misi bupati, kemudian dilanjutkan dengan penentuan isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati,

tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Buayan, serta perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, PENDANAAN INDIKATIF.

Menguraikan rencana program dan berapa rencana kegiatan untuk mendukung indikator sasaran yang ada beserta kerangka pendanaan indikatifnya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

Menguraikan indikator Program yang difokuskan untuk mendukung sasaran RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

Bab VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAYAN

A. Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Buayan

Kecamatan Buayan, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

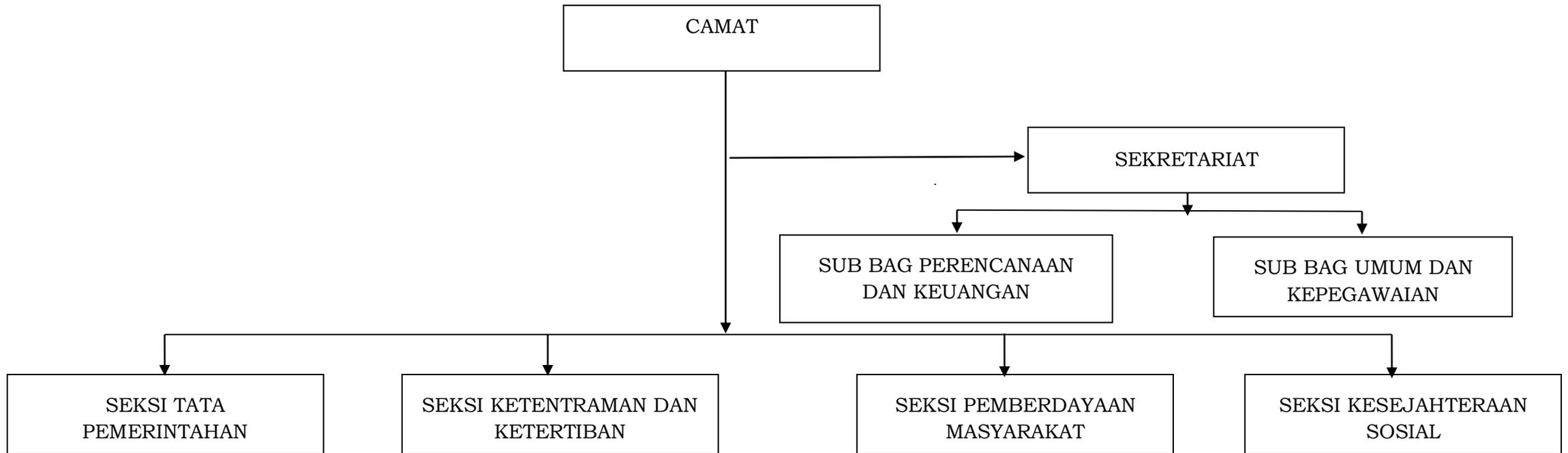
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pasal 2 Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 3 pada peraturan yang sama, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kemudian Pasal 4 ayat (2), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi:

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
8. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Buayan



Berdasarkan bagan pada gambar 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Camat Buayan sampai pada tingkat Sekretariat/Bidang di Kecamatan Buayan atau tingkat Seksi di Kecamatan Buayan sebagai berikut:

1. Camat;

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) sub bagian antara lain:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
 - b. penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau

- Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- m. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- c. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- d. pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
- e. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam ilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Reublik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sumberdaya Perangkat Daerah – Kecamatan Buayan

Sumberdaya Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Buayan meliputi sumberdaya alam, sumber daya manusia/lingkungan dan sarana dan prasarana yang dimilikinya.

1. Sumberdaya Alam / Lingkungan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kebumen (2014), secara geografis, Kecamatan Buayan memiliki luas wilayah 6.842 Ha dengan letak dari permukaan laut sekitar 10 m dengan curah hujan rata-rata 2000 – 3000 ml/tahun. Luas Wilayah Kecamatan Buayan 6.842 Ha terdiri dari Tanah Sawah 1.727 Ha dan Tanah Kering 1.277,9 Ha tanah yang di gunakan bangunan atau pekarangan 1.860,5 Ha dan tanah lain-lain 696,6 Ha. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen 40 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ayah dan Rowokele
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sempor dan Gombong
4. Sebelah Selatan Samudra Hindia

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar Peta Administrasi Kecamatan Buayan di bawah ini.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kecamatan Buayan



Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Buayan dari aspek demografi penduduk Kecamatan Buayan berjumlah ± 66.286 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 33.755 jiwa dan Perempuan berjumlah 32.531 jiwa. Strata pendidikan penduduk Kecamatan Buayan terdiri dari Pendidikan SD 37.639 jiwa,

Pendidikan setingkat SLTP berjumlah 15.387 jiwa, Pendidikan setingkat SLTA berjumlah 6.095 jiwa, Pendidikan setingkat perguruan tinggi berjumlah 615 jiwa. Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Buayan terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua) buah, Puskesmas Keliling sebanyak 1 (satu) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Buayan terdapat Pasar desa sebanyak 5 (lima) buah, Pasar tradisional sebanyak 2 (dua) buah.

Kondisi geografis Kecamatan Buayan merupakan dataran 7 (tujuh) desa dan pegunungan 12 (dua belas) desa dan 1 (satu) desa wilayah pesisir, sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat yang beraneka ragam .

2. Sumberdaya Manusia

Secara Kuantitas, pegawai Kecamatan Buayan berjumlah 24 orang yang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Non Pegawai Negeri Sipil.

Secara kualitas, pegawai Kecamatan Buayan sebagian besar berpendidikan SMA yaitu 9 orang (58,33%), berpendidikan S2 sebanyak 2 orang (8,33%), S1 sebanyak 6 orang (29,17%) dan yang berpendidikan SMP 2 orang (4,17%) dan SD 3 orang. Sedangkan untuk non PNS yang berpendidikan S1 direkrut sebagai tenaga harian lepas ditempatkan dibagian Operator Adminduk.

Pegawai yang menduduki jabatan eselon sebagian besar sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya. Tetapi ada juga yang belum mengikuti yaitu sebanyak 2 orang (0,25%).

Secara lengkap kondisi Sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Buayan disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Komposisi Sumberdaya Manusia pada Kecamatan Buayan 2016

Eselon	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN						DIKLAT YANG DIKUTI		
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	SMA	SMP	SD	JML	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESELON III	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2	-	2
ESELON IV	-	6	-	-	-	6	2	3	1	-	-	6	4	-	4
STAF		6	5	4	-	15	-	2	8	2	3	15	-	-	-
THL	-	-	-	-	1	1		1	-	-	-	1	-	-	-
JML	2	12	5	4		24	2	8	9	2	3	24	-	-	-
% dari Jml Peg.	8,33	50,0	20,83	16,6	4,16	100	8,33	33,3	37,5	8,3	12,5	100	75	-	75

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pegawai Kecamatan Buayan belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. Apabila setiap seksi ada 3 personil, maka total kebutuhan Pegawai Negeri Sipil mestinya berjumlah 26 orang. Berarti Kecamatan Buayan masih kekurangan pegawai sejumlah 2 orang.

ENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUT. JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JML			
Laptop	8			8	10	2	10
Camera Eleckronic	1			1	1		1
Mesin Ketik Electric	1			1	1		1
TV Warna LCD 32 "	1			1	2	1	2
LCD	1			1	1		1
AC	2			2	6	2	6
Pesawat telepon			1		1	1	1
SSB	1			1	1		1
Kipas Angin	1			1	3	2	1
Soundsystem	2	3		5	6	1	6
Microphone			3	3		5	5
Jaringan listrik daya 5500 W	1			1	1		1
Sarpras Kantor							
Mesin Ketik Manual	2			2	4	2	4
Lemari Besi	2			2	8	6	8
Rak kayu	2			2	2		2
Filling Besi	3			3	6	3	6
Papan Pengumuman/informasi	2			2	2		2
Papan Tulis	1			1	1		1
Lemari Kayu	2	3		5	5		5
Kursi Kayu	8	6		14	14		14
Meja Rapat	6			6	8	2	8
Meja Tulis	9	2		11	14	6	4
Meja Resepsionis	3			3	3		3
Kursi Tamu	2			2	2		2
Kursi Putar	2			2	8	6	8
Kursi Plastik	150		25	175	200	50	200
Meja Pejabat Eselon III, IV	4			4	8	4	8
Kursi Pelayanan	6			6	6		6
Kursi Dereta 4 stainless	2			2	2		2
Kotak saran	1			1	1		1
Lemari etalase	2			2	2		2
Tempat Surat Kabar	1			1	1		1

Berdasarkan tabel terlihat bahwa beberapa sarana prasarana penting dalam pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja lainnya perlu penambahan dan pemeliharaan. Kekurangan tersebut diupayakan penambahannya melalui kegiatan pembangunan secara bertahap setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun.

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan

1. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buayan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buayan sebagaimana tertuang pada bab sebelumnya, gambaran pelayanan yang telah dilakukan dapat dicerminkan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis periode 2011-2015. Secara total, pencapaian indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi mencapai 95%. (akan lebih baik jika ditampilkan beberapa database yang terkait)

Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

TABEL 2.3. Review Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buayan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
1	Tersedianya perangk, dan meterai			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya sarana komunikasi SDA dan listrik			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	77%	44,%	57%	76%	84%
3	Terpeliharanya kendaraan dinas			36	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya kegiatan Perangkat Daerah yang direncanakan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya kantor yang bersih indah & nyaman			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya perbaikan peralatan kerja			30	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya ATK			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terpenuhinya kbthn fotocopy			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tesedianya penerangan & instalasi listrk			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedanya bahan bacaan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersalunya informasi dinas dengan cepat			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
12	Lancarnya konsultasi, kordinsi & pelaporan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	92%	100%	100%	87%
13	Tersusunnya database dan profil desa/Kecamatan yang update			6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tersusunnya dokumen perencanaan Kecamatan			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%
15	Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	0
28	Terfasilitasinya kegiatan Program Pembangunan di Wilayah Buayan			20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100%
29	Terlaksanakannya kegiatan pembinaan dan pelatihan perngkat desa			60	0	20	0	20	20	0	20	0	20	20	0	100%	0	100%	100%
30	Terfasilitasinya Kegiatan Penyusunan APBDes			100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%

* Diisi Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran sesuai Rencana Strategis 2010-2015

Berdasarkan Tabel 2.3, rata-rata pencapaian indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sebesar 96%. Dari 30 indikator kegiatan yang dilaksanakan, ada 24 indikator yang mencapai 100 % dari target capaian sedangkan 1 indikator rata-rata capaiannya hanya 67,6%. Kondisi ini disebabkan oleh adanya efisiensinya penggunaan telepon dan listrik. Kegiatan yang sudah dilaksanakan belum konsisten, jadi masih ada beberapa kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun hanya 2 atau 3 kali pelaksanaan, Hal ini karena keterbatasan anggaran yang ada.

2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap tahun Kecamatan Buayan mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 97 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja (Indikator sasaran/Indikator kinerja Utama)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Terpenuhinya sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran																	
Tersedianya perengko, dan meterai	750	750	750	800	700	486	525	750	798	699	65%	70%	100%	100%	100%	-10	43
Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik	5,880	16,590	11,590	13,650	18,000	4,495	5,351	5,828	9,613	13,298	76%	32%	50%	70%	74%	2,424	1761
Terpeliharanya kendaraan dinas	7,000	7,600	10,000	13,000	15,000	6,900	7,595	10,000	12,953	14,888	99%	100%	100%	100%	99%	1,600	1598
Terlaksananya kegiatan perangkat daerah yang direncanakan	7,500	14,500	14,500	16,000	16,018	7,500	14,496	14,496	15,988	15,778	100%	100%	100%	100%	99%	1,704	1656
Terwujudnya kantor yg bersih indah & nyaman	1,500	1,500	1,500	2,000	2,500	1,500	1,500	1,500	2,000	2,500	100%	100%	100%	100%	100%	200	200
Tersedianya peralatan yang dibutuhkan	3,000	6,000	5,000	7,000	7,000	3,000	6,000	5,000	7,000	7,000	100%	100%	100%	100%	100%	800	800
Tersedianya ATK	2,000	3,700	2,860	4,500	4,500	2,000	3,700	2,860	4,500	4,500	100%	100%	100%	100%	100%	500	500
Terpenuhinya kbthn fotocopy	1,426	2,000	1,000	2,840	3,003	1,426	2,000	1,000	2,840	3,003	100%	100%	100%	100%	100%	315	315
Tesedianya penerangan & instalasi lstrk	800	1,000	900	1,200	1,500	800	1,000	900	1,200	1,500	100%	100%	100%	100%	100%	140	140
Tersedanya bahan bacaan	960	960	900	960	1,000	960	840	900	959	1,000	100%	88%	100%	100%	100%	8	8
Tersalunya informasi dinas dg cepat	2,500	2,000	2,000	2,500	4,940	2,490	1,995	1,995	2,496	3,490	100%	100%	100%	100%	71%	488	200

Indikator Kinerja sasaran/Indikator kinerja Utama)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Lancarnya konsultasi, kordinsi & plaprn	11,000	10,000	9,000	18,150	20,200	11,000	9,180	9,000	18,150	17,535	100%	92%	100%	100%	87%	1,840	1307
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan																	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kecamatan	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	100%	800	800
Tersedianya Database Kecamatan																	
Tersusunnya database dan profil desa/Kecamatan	4,400	4,400	6,000	8,600	7,000	4,357	4,400	5,988	8,600	6,840	101%	100%	100%	100%	98%	520	497
Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif																	
Terselenggaranya Musrenbangcam dan Tersusunnya RKP	8,000	10,000	14,600	1,606	17,000	7,900	9,875	14,600	1,606	17,000	101%	99%	100%	100%	100%	1,800	1820
Terselenggaranya Rakor dan Tersusunnya Dokumen Proyek Masuk Desa	3,000	4,400	7,000	7,700	5,000	2,844	4,400	6,999	7,700	5,000	105%	100%	100%	100%	100%	400	431
Bertambahnya sarana dan prasarana kantor																	
Tersedianya peralatan gedung kantor	9,000	7,400	4,000	2,550	0	9,000	7,400	3,450	2,550	0	100%	100%	86%	100%	0	-1800	-1800
Tersedianya sarpras kantor	15,700	3,000	6,500	17,500	45,109	15,700	3,000	6,500	17,500	44,309	100%	100%	100%	100%	98%	5,882	5722
Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1,000	1,500	0	0	0	1,000	1,500	0	0	0	0	100%	0	0	0	-200	-200

Indikator Kinerja (Indikator sasaran/Indikator kinerja Utama)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Terpeliharanya Gedung Kantor	0	3,000	30,000	10,500	5,000	0	3,000	30,000	10,500	5,000	0	100%	100%	100%	100%	1,000	1000
Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	0	1,500	1,500	2,014	2,500	0	1,500	1,500	2,014	2,500	0	100%	100%	100%	100%	500	500
Terpeliharanya mebeleur kantor	0	750	736	0	7,500	0	750	736	0	7,500	0	100%	100%	0	100%	1,500	1500
Terfasilitasnya kegiatan Pemilihan Kepala Desa	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0
Meningkatnya Keamanan dan Ketentraman Lingkungan																	
Terwujudnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan	3,000	0	0	1,500	3,500	2,700	0	0	1,500	3,500	90%	0	0%	100%	100%	100	160
Terselenggarakannya pelatihan dan pendidikan bagi penyandang cacat	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0
Tersedianya data penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0
Meningkatnya SDM Perempuan																	
Terselenggarakannya kegiatan pembinaan PKK	2,200	3,000	0	0	4,000	2,200	3,000	0	0	4,000	100%	100%	0	0	100%	360	360
Terfasilitasnya kegiatan Pembangunan di Wilayah Buayan	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	100%	0	0	0

Indikator Kinerja (Indikator sasaran/Indikator kinerja Utama)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e		
Meningkatnya SDM Perangkat Desa																	
Terlaksanakannya kegiatan pembinaan dan pelatihan perangkat desa	0	0	0	3,000	3,500	0	0	0	3,000	3,500	0	0	0	100%	0	700	700
Tersusunnya Administrasi Desa sesuai dengan aturan																	
Terfasilitasinya kegiatan Penyusunan APBDes	20,000	22,000	22,000	24,200	20,000	19,965	22,000	22,000	24,200	20,000	100%	100%	100%	100%	100%	0	7

* Sesuai Indikator pada Rencana Strategis
2010-2015

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sebelum menentukan isu strategis perlu diidentifikasi permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja berdasarkan tupoksi, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Buayan.

Kecamatan Buayan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat dicerminkan oleh indikator kinerja seperti : Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran; Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai, Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan, Tersedianya database kecamatan, Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif; Prosentase desa yang menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan dan sesuai Rencana Kerja Pembangunan Desa; Prosentase warga yang berperan dalam politik dan Prosentase pengajuan layanan Kartu Tanda Penduduk dan perijinan yang tertangani. Secara lengkap Identifikasi permasalahan berdasarkan hal tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Diguna- kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
Gambaran Pelayanan PERANGKAT DAERAH (Indik. program) 1. Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	IKK Rencana Strategis (100%)	-	Alokasi APBD kabupaten	-
2. Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	70%	IKK Rencana Strategis (83%)	SDM pengguna	Alokasi APBD kabupaten	Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Diguna- kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EKSTER-NAL	
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembang kec.	10 dokumen	IKK Rencana Strategis (20 dok)	SDM Penyusun	Regulasi sering berganti; Bintek Perenc.	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen
3. Tersedianya database kecamatan	5 dokumen	IKK Rencana Strategis (14 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data.	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Sulitnya pencarian data
4. Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	5 dokumen	IKK Rencana Strategis (10 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
5. Tersusunnya dokumen IPMD yang sesuai ketentuan	5 dokumen	IKK Rencana Strategis (10 dok)	SDM Penyusun; Pengarsipan data	Sumber Data; Partisipasi Masyarakat terkait	Kurangnya kerjasama Tim dalam Penyusunan dokumen; Kurangnya partisipasi masyarakat.
7. Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	100%	IKK Rencana Strategis (100%)	- Kapasitas SDM dalam pendampingan desa	Fasilitasi dari kabupaten, alokasi anggaran APBD Kab	Kurangnya kapasitas SDM Kecamatan dalam pendampingan desa
8. Prosentase warga yang berperan dalam politik	100%	IKK Rencana Strategis (100%)	SDM pendamping dan pengawas dari kec	Sosialisasi dari kab; alokasi anggaran APBD	Masih kurangnya Sosialisasi Pilkades yang lebih menarik;
9. Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	100%	IKK Rencana Strategis (100%)	SDM Pengelola;	SOP yang jelas; Ketersediaan Sarpras; Alokasi anggaran APBD kab	Belum adanya Penayangan SOP secara transparan kpd masyarakat; Belum memadainya Sarpras

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diidentifikasi permasalahan di Kecamatan Buayan antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran kedisiplinan dalam pemakaian dan perawatan sarpras
2. Kurangnya kerjasama Tim dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan adanya kerja tim
3. Sulitnya pencarian data yang akurat
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kecamatan yang melibatkan masyarakat
5. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia Kecamatan dalam pendampingan desa
6. Belum adanya Penayangan Standart Operasional Pelayanan secara transparan kepada masyarakat;
7. Belum memadainya Sarpras untuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan jaman. Beberapa isu strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi

hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai isu strategis disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Penyebaran paham Radikalisme	Lunturnya rasa Nasionalisme	Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota linmas, pembinaan karangtaruna dan organisasi kepemudaan	
2	Isu kewarganegaraan ganda Mulai Dicanangkannya MEA	Isu 20 juta penduduk belum ber KTP. Belum bisa bersaing dengan Ekonomi Lokal	Belum optimalnya pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat, pelatihan aparatur	

C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kecamatan mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Adapun misinya ada 6 dimana Kecamatan Buayan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 1, 2, 4 dan 6 yang dimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Kecamatan Buayan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Kurangnya pembinaan pada Karangtaruna	Adanya Pemuda sudah punya wadah karangtarua
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kurangnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurang tersedianya anggaran	Adanya lembaga-lembaga desa
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi			
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Belum optimalnya peran anggota Linmas	Kurangnya pembinaan pada anggota Linmas	Adanya anggota Linmas di setiap Desa
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Belum tersedianya data penduduk miskin yang up to date	Belum tercukupinya anggaran yang tersedia	Adanya sumber daya manusia yang melakukan pendataan
Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnyanya kuantitas sumber daya manusia		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih Kurangnya Sarana/Prasarana a aparatur yang memadai	Anggaran yang tersedia belum mencukupi	
Program Pengembangan Data/Informasi	Belum semua sumber daya manusia berperan aktif dalam proses penyusunan dok perencanaan dan evaluasi pembangunan	Kualitas sumber daya yang masih kurang	Kuantitas sumberdaya yang ada

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Belum terdokumennya database secara kontinue dan up to date	Masyarakat kurang berperan aktif dalam proses penyusunan dan pendataan	
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada.	Tersedianya sumber daya manusia yang
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Belum optimalnya peran PKK dalam pembangunan.	Kurangnya anggaran yang tersedia	Adanya wadah perkumpulan perempuan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KTP, KK dan akte kelahiran	Tersedianya anggaran yang mencukupi
Program perencanaan pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurangnya pemahaman masyarakat perencanaan pembangunan	Tersedianya anggaran yang mencukupi.

Berdasarkan tabel 3.3, dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Belum tercukupinya anggaran yang tersedia
Pada Kecamatan Buayan sebagian besar anggaran yang tersedia pada setiap kegiatan belum tercukupi.
2. Kurangnya pembinaan pada karangtaruna.
Masalah tersebut disebabkan dana pembinaan yang ada tidak mencukupi.
3. Kurangnya pembinaan anggota Linmas, disebabkan dana pembinaan yang ada tidak mencukupi
4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada, ini merupakan salah satu penghambat pembangunan di Kecamatan Buayan, karena masyarakat tidak banyak terlibat didalamnya.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain :

1. Tersedianya dana dari Pemerintah Daerah, meskipun dana tersebut sebagian besar untuk melaksanakan kegiatan belum dapat mencukupinya.
2. Adanya sumber daya manusia yang melakukan pendataan, dengan adanya sumber daya manusia dalam melakukan pendataan

penduduk miskin merupakan faktor pendorong tersusunnya data penduduk miskin di Kecamatan Buayan.

3. Adnya wadah pemuda, adanya anggota Linmas pada setiap Desa, adanya lembaga-lembaga desa, adanya wadah perkumpulan perempuan, merupakan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan di Kecamatan Buayan.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan Kecamatan Buayan tersebut dapat ditentukan beberapa isu strategis antara lain :

1. Penambahan Sarana/Prasarana aparatur yang memadai
2. Optimalisasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang terkait
3. Penyusunan database Kecamatan Buayan secara kontinue dan uptodate
4. Peningkatan sosialisasi kepada seluruh Desa agar pelaksanaan APBDes lebih optimal
5. Peningkatan pembinaan kepada desa agar inventarisasi pembangunan desa dapat akurat

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

A. Visi

Kecamatan Buayan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Kecamatan Buayan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi ke 1, 2, 4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Kecamatan Buayan

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2016-2021 pada Kecamatan Buayan dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Buayan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	PD Penganggungjawab	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			Kondisi pada akhir Periode Renstra (Akhir 2021)
							Target	Target	Target	Target	Target	Target			
Mendukung Peningkatan partisipasi pemuda dalam skala regional dan nasional	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional sebesar 58%	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan		%	100	100	100	100	100	100	100			
				Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	kelompok	4	4	4	4	4	4	4	24		
Mendukung pengembangan wawasan kebangsaan	Banyaknya pemuda yang terlatih wawasan kebangsaan 300 orang	Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda yang berwawasan kebangsaan			50	50	50	50	50	50	50	250		
				Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	orang	50	50	50	50	50	50	50	300		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir Periode Renstra (Akhir 2021)	Lokasi	PD Penanggungjawab
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
							Target	Target	Target	Target	Target	Target			
Mendukung terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Penurunan Kasus Pelanggaran perda dan kriminalitas	Peningkatan keamanan lingkungan	Tertanganinya kasus kriminalitas		%	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	kasus	100	90	80	70	60	50	50	50		
Mendukung Terwujudnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Menurunnya Angka Kemiskinan hingga menjadi 15,45%	Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6			
			Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir Periode Renstra (Akhir 2021)	Lokasi	PD Penanggungjawab	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Opini BPK atas LKPD berupa WTP	Meningkatnya kinerja layanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan		%	90	91	92	93	94	95	96	96			
			Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		angka	B	B	B	B	B	A	A	A			
			Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran		%	100	20	20	20	20	20	20	20	100		
			Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai		%	70	3	2	3	2	3	2	2	83		
			Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan		dokumen	4	5	4	4	4	4	4	4	25		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	PD Penggun- gja wa b
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi pada akhir Periode Renstra (Akhir 2021)		
							Target	Target	Target	Target	Target	Target			
				Tersedianya database kecamatan	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	12		
				Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	dokumen	5	1	1	1	1	1	1	6		
				Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	kelompok	20	20	20	20	20	20	20	20		
				Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	%	50	60	70	80	90	100	100	100		
				Prosentase warga yang berperan dalam politik	%	100	-			100			100		

D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Perangkat Daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan petugas dan fungsi Perangkat Daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan			
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Pembinaan kepemudaan dan sosial masyarakat	Meningkatkan Peran Serta kepemudaan
	2. Meningkatnya rasa cinta terhadap nilai nilai luhur budaya bangsa.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Mengembangkan Wawasan Kebangsaan

<p>MISI 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, peningkatan ahlak	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
<p>MISI 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan</p>			
Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Upaya Fasilitasi TKP2Kdes	Melayani dan merehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa
<p>Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama</p>			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Mengupayakan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan sarpras penunjang kapasitas kelembagaan aparatur
		Fasilitasi kepada masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan wilayah
		Fasilitasi pelayanan KTP dan Perijinan	Meningkatkan Sistem Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Kecamatan Buayan berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Buayan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
3. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah;
4. Program Perencanaan Pembangunan
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa
7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
8. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
10. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
11. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Buayan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
4. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan kompenen instalansi listrk/ penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
11. Penyediaan makan dan minum;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
14. Pengadaan Mebeleur
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
17. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
18. Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur
19. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
20. Penyusunan Database dan Profil Desa/Kecamatan
21. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
22. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
23. Pembinaan sosial masyarakat;
24. Fasilitasi TKP2KDes/ Kel;
25. Fasilitasi program pembangunan;
26. Fasilitasi ADD;
27. Fasilitasi APBDes;
28. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
29. Kegiatan pembinaan anggota Linmas;
30. Pembinaan PKK;
31. Fasilitasi pemilihan kepala desa;

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan misi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kecamatan Buayan dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam Renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 6.1

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Buayan, selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2021 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkannya rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tahun ke empat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Buayan selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Buayan berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Buayan berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Kecamatan Buayan diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana strategis Kecamatan Buayan Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buayan

Buayan, 2016

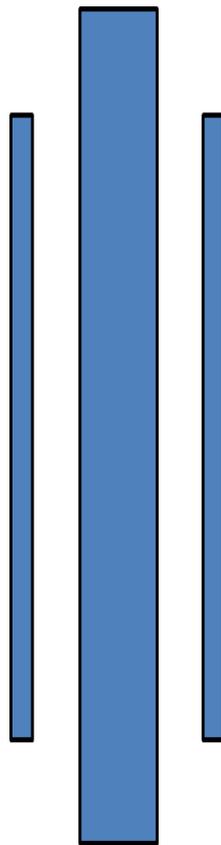
CAMAT BUAYAN

SUPOYO, S.Sos

NIP. 19610925 198803 1 005



**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN
TAHUN 2015**

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS/KECAMATAN

.....
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal bulan tahun telah diselenggarakan forum PERANGKAT DAERAH Penyusunan Rencana Strategis PERANGKAT DAERAH yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi..... (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum PERANGKAT DAERAH terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :
forum PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota*) :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) PERANGKAT DAERAH, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Rencana Strategis PERANGKAT DAERAH..... provinsi/kabupaten/kota*)... ..Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini (sebagaimana tabel 4.3)
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas PERANGKAT DAERAH..... provinsi/kabupaten/kota*) ... Tahun - yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini (SEBAGAIMANA Tabel 5)
- KETIGA : Indikator kinerja PERANGKAT DAERAH yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini (sebagaimana Tabel 6)
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis PERANGKAT DAERAH..... Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Kepala PERANGKAT DAERAH
selaku pimpinan sidang Forum PD
Dinas/Kecamatan

.....

Mewakili Peserta Forum PERANGKAT DAERAH Penyusunan Rencana Strategis PD..... Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum PD

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PD
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Forum PD.....

Kabupaten

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst..				

